

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

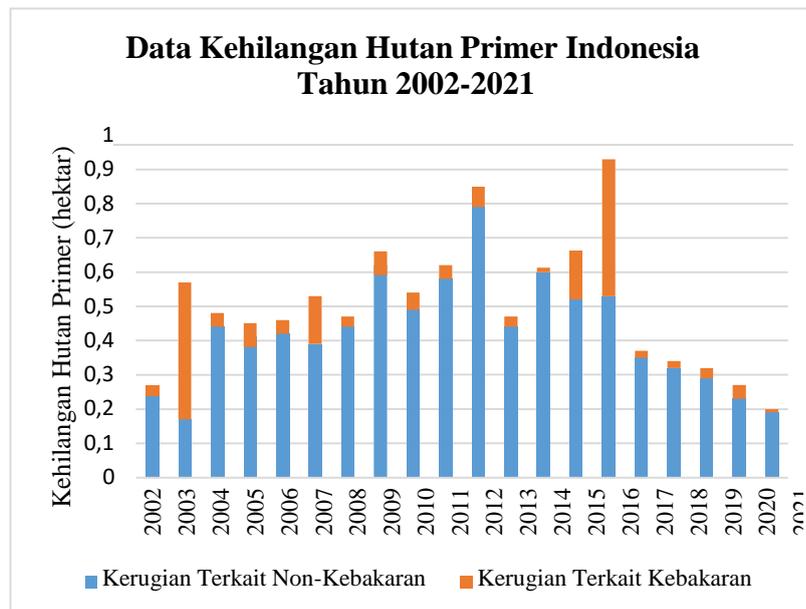
Indonesia telah menjadi salah satu negara dengan luas hutan terluas dan keanekaragaman hayati terbanyak. Namun, akibat dari ulah manusia yang tidak bertanggung jawab berdampak pada deforestasi, kerusakan hutan terus meluas, kebakaran hutan, hingga hilangnya banyak tanaman asli Indonesia (Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem, 2017). Dalam melestarikan hutan, diperlukan inisiatif terobosan baru melalui konservasi yang keberlanjutan seiring semakin berkurangnya luasan areal hutan lindung. Sejak bulan Maret 2008, Pulau Kalimantan telah diresmikan sebagai satu dari 40 Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Indonesia diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 yang terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). (WWF, 2017).

Dalam menanggapi permasalahan lingkungan yang terus meningkat, salah satu upaya yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia telah dijelaskan melalui Alue Dohong, yang menjabat sebagai Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada acara *International Conference on Wildlife Conservation*, 13 September 2022 di Jakarta. Pada konferensi tersebut Wakil Menteri membahas pencapaian upaya konservasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Pemerintah telah bekerja keras untuk mengatasi masalah konservasi hutan dan pelestarian satwa liar di tingkat domestik dan internasional (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022).

Inisiatif *Reverse the Red* yang telah diterapkan Indonesia untuk melindungi spesies salah satunya sebagai berikut, Pemerintah Indonesia telah melepasliarkan 335.047 satwa liar dari berbagai pasar gelap ke habitat aslinya selama pandemi COVID-19 dalam upaya untuk meningkatkan jumlah populasi dan keragaman genetik pada ekosistem alam liar. Kemudian dengan menggunakan teknologi kalung GPS, para peneliti dapat melacak keberadaan dari harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) yang terancam punah, gajah sumatera (*Elephas maximus sumatrensis*) yang dilepasliarkan, dan orangutan (*Pongo pygmaeus*) yang dilengkapi telemetri radio untuk pemantauan pasca-pelepasliaran di alam liar (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022).

Disamping itu *United State Agency For International Development (USAID)* yang merupakan badan pembangunan internasional Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas bantuan ekonomi, kemanusiaan, dan sebagai pelaku katalisator yang mendorong hasil pembangunan. USAID menjalin kemitraan dengan Pemerintah Indonesia pertama kali pada tahun 1950 dengan kerja sama di bidang ekonomi dan teknik. Pemerintah Amerika Serikat pada awalnya mendukung pembangunan Indonesia dengan berfokus pada kebutuhannya yang paling mendesak. Saat itu, Pemerintah Indonesia tengah mencari bantuan untuk mengatasi kekurangan pangan, mengatasi masalah kesehatan yang signifikan, memperbaiki infrastruktur transportasi, dan menumbuhkan industri (USAID, 2022).

Tabel 1.1.



Sumber: *World Resources Institute*

Dapat diperhatikan pada gambar 1.1., yang menjelaskan bahwa selama empat tahun berturut-turut pada 2020, laju kehilangan hutan primer di Indonesia berhasil menunjukkan penurunan. Pada tahun 2020 menjadi tahun yang penting bagi negara dan organisasi internasional dalam menurunkan laju kerusakan hutan dan berkomitmen dalam tujuan global melawan deforestasi atau penggundulan hutan untuk alih fungsi lahan hutan menjadi pemukiman ataupun lahan pertanian. Jika kerusakan hutan tropis primer terus meningkat, hal tersebut dapat berdampak pada bumi yang dengan perubahan iklim yang ekstrem dan menunjukkan bahwa umat manusia telah gagal dalam memenuhi target pembangunan berkelanjutan tersebut (WWF, 2017).

Program USAID SEGAR akan membantu Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Kemitraan yang tengah berjalan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat ini telah ditandatangani pada 26 Februari 2021. Kerja sama tersebut berupa kegiatan selama lima tahun dengan nilai bantuan luar negeri senilai 32.700.627 dollar, yang ditujukan untuk menurunkan ancaman terhadap keberagaman satwa pada kawasan hutan dengan tingkat konservasi tinggi. Program *Sustainable Environmental Governance Across Regions (SEGAR)* mempromosikan tujuan pembangunan Indonesia, yang mencakup keseimbangan pelestarian keanekaragaman hayati, penggunaan lahan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi, serta mata pencaharian inklusif yang dapat dirasakan manfaatnya oleh generasi di masa depan (USAID, n.d.). Oleh sebab itu, konservasi merupakan salah satu isu yang penting untuk dapat diselesaikan demi tujuan pembangunan global yang berkelanjutan dalam menjaga ekosistem darat (US Embassy, 2022).

Pada saat ini, studi literatur yang meneliti tentang dukungan yang diberikan USAID kepada pemerintah Indonesia melalui program USAID SEGAR memang masih sedikit dan jarang. Namun, pola penelitian ini dimiliki oleh banyak penelitian dan studi literatur lainnya. Berikut adalah beberapa studi literatur yang penulis pilih dari penelitian sebelumnya yang memiliki pola serupa dan terkait dengan bantuan USAID untuk mendukung upaya konservasi pemerintah Indonesia. Studi literatur yang pertama berjudul “Peran *United State Agency International Development (USAID)* dalam Konservasi Laut di Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau” oleh (Sari & Rani, 2018).

Pada penelitian tersebut membuktikan bahwa kontribusi USAID (*United States Agency for International Development*) terhadap konservasi laut wilayah Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau telah berjalan dengan baik melalui pemberian dana hibah sebesar 40 juta dollar AS, atau setara dengan 532 miliar. Pada skema konservasi tersebut mencakup total enam juta hektar yang tersebar di 15 Kawasan Konservasi Laut yang meliputi upaya perlindungan pada 13 kabupaten di Papua Barat dan Maluku. Studi literatur tersebut memfokuskan pada peran USAID terhadap perlindungan laut yang dilakukan dalam program kerja *Marine Protected Areas Governance (MPAG)* dan kontribusi lainnya guna menjaga kelestarian biota laut, hal tersebut sejalan dengan penelitian ini yang membahas mengenai program *Sustainable Environmental Governance across Regions (SEGAR)* yang merupakan kerja sama konservasi hutan dan tata kelola lingkungan antara Pemerintah Indonesia melalui Bappenas dan Pemerintah Amerika Serikat melalui USAID.

Selanjutnya studi literatur berjudul “Implementasi Program *Fauna and Flora International (FFI)* dalam Konservasi Hutan Kawasan Ulu Masen di Kecamatan Mane Provinsi Aceh” oleh (Fasha & Pakpahan, 2016). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa dengan mengimplementasikan sejumlah proyek untuk meningkatkan kesadaran akan keanekaragaman hayati yang melimpah, FFI menjalankan program konservasinya dengan lebih menekankan pada masyarakat di kawasan dalam dan sekitar hutan. Program yang telah dijalankan FFI pada wilayah Kecamatan Mane selama kurang lebih dua tahun (2008–2010) berjalannya program tersebut telah berhasil menciptakan program yang berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan dengan kesadaran penduduk setempat akan perlunya melestarikan

hutan dan kemampuan mereka untuk hidup berdampingan secara damai dengan satwa.

Sedangkan pada penelitian ini, penulis akan membahas mengenai upaya USAID sebagai organisasi internasional dalam mendukung jalannya program USAID SEGAR yang berfokus pada hutan Kalimantan. Pemilihan wilayah Kalimantan dipilih karena Kalimantan merupakan salah satu provinsi prioritas dalam Strategi Kerjasama Pembangunan Negara atau *Country Development Cooperation Strategy (CDCS)*, empat provinsi ini merupakan anggota Gugus Tugas Iklim & Hutan (GCF) yang meliputi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Aceh. Kalimantan merupakan wilayah kerja USAID SEGAR dengan tingkat konservasi yang tinggi, hal ini mendukung upaya pelestarian kawasan konservasi dan penggerak pembangunan daerah, sosial masyarakat hingga tercipta kondisi yang berkesinambungan pada masyarakat dan lingkungan (USAID, n.d.).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana upaya USAID dalam mendukung Pemerintah Indonesia terkait konservasi hutan Kalimantan melalui program *Sustainable Environmental Governance Across Regions (SEGAR)*?”**.

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Secara Umum

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana (S1) program studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2. Secara Khusus

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara detail tentang bagaimana upaya dari USAID dalam mendukung Pemerintah Indonesia terkait konservasi dan tata kelola hutan Pulau Kalimantan secara berkelanjutan melalui program USAID SEGAR. Penelitian ini ingin mendeskripsikan bagaimana upaya USAID dalam mendukung Pemerintah Indonesia dalam kemitraan program USAID SEGAR, serta menunjukkan partisipasi sektor swasta, Pemerintah Daerah, beserta masyarakat lokal dalam menjaga ekosistem darat dengan yang diharapkan dapat digunakan manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan sebijak mungkin (Ban, 2016, pp. 2356-2358).

1.4. Kerangka Pemikiran

1.4.1. Konsep *International Non-Governmental Organization (INGOs)*

Menurut Myers (1954), organisasi internasional adalah kumpulan kerjasama yang terkoordinasi (*Organized Cooperation*), yang biasanya terbentuk dalam perjanjian multilateral yang akan menjadi awal mula berdirinya sebuah struktur organisasi internasional. Kemudian menurut Lewis & Kanji (2009), *International Non-Governmental Organization (INGOs)* biasanya memiliki anggota yang termasuk dari kelompok swasta dan berbagai macam bidang

ekonomi, pendidikan atau penelitian, dan bantuan teknik. INGOs dipandang sebagai aktor yang turut memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan global, juga sebagai penyedia layanan bagi orang-orang dan komunitas yang terpinggirkan dengan tidak berorientasikan pada keuntungan (Lewis & Kanji, 2009, p. 5). Banyak yang menjelaskan terkait organisasi internasional yang dianggap sebagai sebuah entitas formal dan berkesinambungan yang terbentuk melalui kesepakatan antara para anggotanya. (keanggotaan negara dan non-negara), yang terdiri dari dua negara bagian atau lebih, dengan tujuan umum adalah yang merupakan kepentingan bersama yaitu untuk memajukan kepentingan para anggotanya (Myers, 1954, pp. 49(2), 282).

Menurut Myers (1954), terdapat begitu banyak *INGOs* yang terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan keamanan, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan. Contoh organisasi internasional yang bergerak dalam bidang keamanan yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau *United Nations (UN)*. PBB dibentuk setelah perang dunia kedua dengan tujuan untuk mencegah kembali terulangnya perang dan untuk menjaga perdamaian (Weiss, 2010, pp. 51-58). Contoh organisasi internasional pada bidang ekonomi adalah *World Trade Organization (WTO)*, yang menjadi aktor kunci antar pemerintah dalam ekonomi global, membantu negara-negara untuk mewujudkan tujuan ekonomi yang lebih maju dengan membangun platform sebagai tempat pemerintah bernegosiasi, membuat kesepakatan, dan menyelesaikan perselisihan di bursa perdagangan (Paquin, 1987, p. 1250). Banyak *INGOs* yang bergerak pada bidang kesehatan, seperti *Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS)*, dan *World Health Organization (WHO)*, yang memiliki peran dalam menangani masalah kesehatan global (Merson, O'Malley, Serwadda, & Apisuk, 2008, pp. 475-488).

Terdapat organisasi internasional yang juga berfokus pada isu lingkungan seperti *United Nations Environment Programme (UNEP)*, dan *United States Agency for International Development (USAID)* yang telah menangani berbagai masalah lingkungan global. USAID bertanggung jawab dalam menyediakan bantuan ekonomi, pembangunan, dan kemanusiaan ke seluruh dunia (Carter, Hill, & Greg, 2007, pp. 39-43). Pada tahun 2019, USAID berkolaborasi di hampir 60 negara untuk melindungi keanekaragaman hayati, memobilisasi pendanaan swasta, memerangi kegiatan ilegal pada hutan, dan mempromosikan sumber hayati dan perikanan berkelanjutan. Semua upaya ini membantu negara-negara mitra mengembangkan ketahanan sumber daya alam untuk masa depan.

USAID telah mengembangkan program komprehensif yang meningkatkan inisiatif-inisiatif guna memerangi kejahatan terhadap satwa liar, melalui perbatasan kawasan hutan lindung dan pelabuhan, untuk menurunkan permintaan konsumen akan produk flora dan fauna ilegal (USAID, n.d.). Hal tersebut dilakukan sebagai tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari USAID sebagai organisasi internasional. Seperti terlibat dalam berbagai macam kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui edukasi tentang menggunakan sumber daya dengan bijak, perencanaan dan penanggulangan bencana, dan pemberdayaan sosial masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan menjaga lingkungan, memberikan beasiswa

pendidikan, mendanai pemeliharaan fasilitas umum, atau memberikan donasi untuk membangun desa (Lindgreen & Swaen, 2010, pp. 3-4).

Program USAID turut memberikan bantuan luar negeri dalam pengembangan kegiatan lokal termasuk perencanaan penganggaran dalam penanganan dan pengolahan sumber daya alam, kelautan, dan upaya penyelamatan serta konservasi hutan di Indonesia. Organisasi internasional adalah bentuk kerja sama internasional antar negara yang dilembagakan (Perwita & Yani, 2005, p. 27). Oleh karena itu, organisasi internasional memainkan peran penting dalam mengidentifikasi serta memberi perhatian pada wilayah yang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Organisasi internasional seperti USAID telah mendanai dan menetapkan tujuan operasional dengan baik untuk partisipasi mereka dalam memberikan bantuan kemanusiaan. Melalui bantuan luar negeri, organisasi internasional dapat membantu jutaan orang di dunia dengan memenuhi kebutuhan mendasar mereka seperti makanan, pelayanan, dan obat-obatan (Rasyidah, 2014, pp. 96-97).

1.4.2 Konsep Bantuan Luar Negeri (*Foreign Aid*)

Bantuan luar negeri menurut Morgenthau (1962) adalah sebuah pemberian bantuan dana, bantuan militer dan bantuan makanan, atau layanan jasa yang dilakukan negara pemberi bantuan atau donor dengan negara penerima bantuan. Bantuan finansial tanpa pengembalian merupakan salah satu dari berbagai instrumen ekonomi yang sering digunakan oleh negara-negara maju untuk mendorong pencapaian tujuan kebijakan luar negerinya., terutama setelah Perang Dunia II berakhir. Program bantuan luar negeri dengan beberapa tujuan, seperti pembangunan infrastruktur untuk negara penerima, dan beberapa kategori yaitu

bantuan kemanusiaan, penghidupan (*subsistence*), keamanan (*military*), menyogok (*bribery*), kehormatan (*prestige*), pembangunan ekonomi (*economic development*) (Morgenthau, 1962, pp. 56(2), 301-309). Bantuan luar negeri pada bidang kemanusiaan ditujukan kepada mereka yang kurang beruntung dan bersifat non-politik. Bantuan ini diberikan oleh pemerintah sebuah negara kepada negara-negara yang mengalami bencana alam seperti banjir, kelaparan, dan wabah penyakit (Lengauer, 2011, pp. 2, 44-48).

Pada bantuan luar negeri penghidupan (*subsistence*) mirip dengan bantuan kemanusiaan, bantuan sarana penghidupan tidak terkait dengan kepentingan apa pun. Bantuan semacam ini berfokus pada bahaya kelaparan dan kemiskinan. Dengan bantuan substansi ini, krisis akan dapat dihindari dan negara-negara yang sedang berjuang melawan kelaparan atau permasalahan ekonomi akan diuntungkan dari bantuan ini. Kemudian, pemberian bantuan militer adalah untuk pembelian barang, jasa, dan pelatihan pertahanan. Bantuan keamanan (*military*) ini diberikan untuk membantu sebuah negara atau aliansi dalam mengatasi ancaman global seperti terorisme dan memperkuat kemampuan pertahanan mereka. Lalu kategori bantuan berupa sogokan (*bribery*) yang dapat disebut sebagai suap atau korupsi yang memiliki tujuan untuk memuluskan strategi negara-negara yang memberikan bantuan dalam bentuk suap (Lengauer, 2011, p. 44).

Bantuan luar negeri kehormatan (*prestige*) mengacu pada keinginan negara pemberi bantuan untuk menjunjung tinggi reputasi positifnya di mata dunia dan memiliki tujuan untuk mendapat sebuah pengakuan sebagai bangsa yang berdaulat. Bantuan luar negeri untuk pembangunan ekonomi (*economic development*) ini diberikan untuk mendorong pembangunan dan memerangi kemiskinan, paling

sering diberikan sebagai *Official Development Assistance (ODA)*. ODA berasal dari dana hibah kerjasama bilateral antar negara, sementara sejumlah uang juga datang dalam bentuk pinjaman, seringkali difasilitasi oleh organisasi internasional dan non-pemerintah. Dalam hal transparansi, bantuan semacam ini memiliki resiko. Karena dapat dipandang sebagai investasi atau sekedar memberikan bantuan modal. Bantuan asing terkadang ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh negara penerima, beberapa di antaranya untuk kepentingan negara pemberi bantuan (Lengauer, 2011).

Amerika Serikat menawarkan bantuan ke luar negeri untuk mempromosikan berbagai tujuan internasional, termasuk pelestarian ekosistem dan satwa. Untuk membantu upaya konservasi di seluruh dunia, Amerika Serikat menawarkan dukungan keuangan, program, dan teknis di luar negeri. Di antara isu permasalahan lingkungan lainnya, upaya konservasi internasional yang dilakukan berfokus pada perlindungan spesies, pemulihan habitat, dan regenerasi hutan. Salah satu organisasi federal yang mengelola program-program tersebut adalah *U.S. Fish and Wildlife Service (FWS)*, *the U.S. Forest Service*, *the U.S. Department of the Treasury*, *the Department of State*, dan *the U.S. Agency for International Development (USAID)* (US Fish and Wildlife Service, 2021).

Pada konsep bantuan luar negeri ini akan mengeksplorasi dampak karakteristik negara penerima utama dan preferensi donor untuk menjelaskan distribusi bantuan keanekaragaman hayati yang beragam. Hal tersebut berfokus pada tiga kategori karakteristik negara penerima:

1. Efektivitas tata kelola mereka
2. Keanekaragaman hayati dan pembangunan mereka

3. Kekuatan ekonomi dan politik yang dapat mereka berikan kepada para donor (Alesina, 2000, p. 33)

Karakteristik ini sesuai dengan kategori manfaat penerima, kebutuhan penerima, dan pengaruh negara penerima yang sering ditemukan dalam publikasi ilmu politik, ekonomi, dan sosiologi tentang distribusi bantuan pembangunan secara lebih umum. Banyak dari masyarakat di negara berkembang yang tinggal di atau dekat dengan hutan. Sejak tahun 1960, bantuan dana telah dialokasikan kepada sektor kehutanan dengan tujuan pengelolaan yang berkelanjutan. Menurut studi tentang bantuan luar negeri yang difokuskan pada isu lingkungan, jenis bantuan pembangunan ini diberikan tergantung pada kebutuhan lingkungan negara penerima. Dengan tujuan yang sama, donor lingkungan utama seperti *Global Environment Facility (GEF)* secara eksplisit mempertimbangkan kebutuhan negara penerima saat mengalokasikan sumber daya (Chan, Shaw, & Cameron, 2006, pp. 4, 377-379).

Dalam menjalankan kerja sama, organisasi internasional turut menjalin kemitraan dengan aktor lainnya (*multi-stakeholder partnership*) yang meliputi sektor swasta ataupun aktor lokal seperti Pemerintah daerah dan LSM yang biasanya turut menerima dana yang disalurkan melalui bantuan luar negeri untuk tata kelola dan pelaksanaan proyek kerja sama yang tengah dilakukan (Beishiem, Ellersiek, & Lorch, 2018, pp. 211-213). LSM mengambil peran penting dalam kerja sama yang difokuskan untuk mengatasi permasalahan lingkungan yaitu melakukan pendekatan politik formal ataupun informal. LSM turut memberikan dukungan dan menjalin kemitraan terhadap program konservasi organisasi-organisasi internasional (Romero-Brito, Buckley, & Byrne, 2016, pp. 1-2).

1.4.3. Konsep Konservasi

Hutan menurut Siregar (2009) merupakan tempat tinggal alami dari satwa dan berbagai kehidupan hayati di dalamnya. Akan tetapi, kerap terjadinya konflik antara manusia dan hewan akan mengakibatkan rusaknya ekosistem alam yang telah tersusun. Salah satu strategi pelestarian satwa adalah konservasi, tanpa adanya konservasi dan pemeliharaan lingkungan maka alam tidak akan bertahan lama. Konsep konservasi mengacu pada perlindungan dan pelestarian penggunaan sumber daya alam dengan bijak yang dilakukan untuk menjaga ketersediaannya dan memperluas keanekaragaman dan potensinya (Christanto, 2014, p. 1.3). Kebutuhan untuk melindungi sumber daya alam dari degradasi lingkungan telah memunculkan sebuah konsep konservasi, yang diakui dapat menangani kerusakan lingkungan. Upaya konservasi juga dapat mencakup ruang lingkup adaptasi, restorasi, dan pembangunan kembali (WWF, 2017).

Melalui *foreign aid*, berbagai macam pelayanan telah diberikan seperti *Technical Assistance (TA)* yang berupa bantuan teknis dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan difokuskan dalam penanaman nilai-nilai ekologis. Dalam hal ini, *technical assistance* memberikan informasi dan saran, serta pendampingan oleh tenaga ahli kepada negara-negara yang membutuhkan bantuan, serta dalam mendukung program-program konservasi yang sedang berjalan (Wilson, 2007, pp. 183-184). Selanjutnya adalah pemantauan hutan atau *Forest Monitoring* yang turut melibatkan dukungan oleh kelompok masyarakat adat dan lokal, serta LSM dalam merancang strategi mendorong sistem konservasi, dan tata kelola hutan. Meliputi cara yang efektif dengan memantau kawasan hutan secara konsisten dan dilakukan melalui alat pemantauan satelit, untuk mengkarakteristik

satwa liar dan *monitoring* terhadap kondisi hutan serta gangguan yang dapat mengganggu ekosistem (Huete, 2012, p. 513).

Kawasan konservasi ditujukan untuk memperkuat manfaat yang dihasilkan oleh bumi beserta potensi sumber daya alam yang tersedia telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008. (Indonesia, 2008). Oleh karena itu, kawasan konservasi harus dilindungi dari tindakan yang dapat merusak kemampuan kawasan konservasi. Perlindungan berdasarkan hukum diberikan kepada tempat-tempat yang dilindungi sebagaimana ditentukan oleh suatu negara sebagai kawasan lindung (Yulius, Ramdhan, & Rahmania, 2019, pp. 3-4). Pengelolaan kawasan lindung (*Protected Area Management*), dilakukan untuk mencapai tujuan pengelolaan baik dari pemerintah, organisasi, dan aktor-aktor lainnya. Upaya pengelolaan hutan meliputi penyelesaian masalah terkait kawasan konservasi dan mencegah munculnya masalah-masalah di masa depan, pemantauan dan penertiban pemegang izin terkait pemanfaatan hutan, inisiatif restorasi hutan dan perlindungan lingkungan, melaksanakan kebijakan kehutanan nasional pada wilayah provinsi, kabupaten atau kota (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018).

Tujuan utama konservasi keanekaragaman hayati adalah menghentikan kepunahan. Meskipun konservasi tingkat spesies diperlukan untuk mencegah kepunahan, konservasi keanekaragaman hayati juga perlu dilakukan tindakan perlindungan yang merujuk pada tingkatan ekosistem, spesies, dan genetik (Samedi, 1993, pp. 1-6). Restorasi dan pembangunan kembali juga merupakan jenis perbaikan yang harus dilakukan setara dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan nilai-nilai alam yang lestari. Dengan kata lain, konsep konservasi turut

mencakup siklus memperbaharui (*renew*), menggunakan kembali (*reuse*), mengurangi (*reduce*), mendaur ulang (*recycle*), dan mengembalikan (*refund*) (Thackray, 1999, pp. 20, 24).

Pemanfaatan dan upaya untuk melindungi sumber daya alam dan ekosistem hayati melalui konservasi melibatkan banyak aktor yang terlibat seperti anggota masyarakat adat, pelaku bisnis, organisasi internasional atau LSM. Hal ini dapat dicapai melalui pendekatan budaya, kearifan lokal, maupun kemajuan teknologi. Oleh karena itu, peran suatu negara dalam konservasi sangat penting menyusun strategi lokasi konservasi dan anggaran telah dilakukan, serta menentukan luas kawasan konservasi, juga melihat dari undang-undang yang mengatur kawasan lindung dan satwa, memberi hukuman pada orang yang memperdagangkan satwa dan biota laut yang dilindungi. Perlindungan sistem siklus kehidupan, pelestarian keanekaragaman spesies dan kondisi lingkungannya, serta penggunaan sumber daya alam secara efisien merupakan contoh upaya pengelolaan konservasi untuk melestarikan keanekaragaman hayati (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2022).

Peran organisasi dalam upaya konservasi adalah untuk mengkategorikan banyak spesies makhluk hidup yang menghadapi kepunahan. Peran yang berfokus menghasilkan penelitian menyeluruh tentang spesies, termasuk analisis ancaman bagi satwa yang dilindungi, telah berada di bawah lingkup *International Union for Conservation of Nature (IUCN)* untuk konservasi alam dan sumber daya alam (IUCN, 2014). Saat ini terdapat antara 10% dan 15% kawasan konservasi di seluruh dunia, tetapi *Convention on Biological Diversity (CBD)* mendesak negara-negara anggota untuk melestarikan setidaknya 10% dari luas lahan mereka untuk kawasan konservasi. Sehingga banyak dari wilayah dengan semua jenis flora ataupun fauna

yang tidak mendapatkan perlindungan semaksimal mungkin dalam sistem kawasan lindung, karena konflik antara perlindungan ekosistem dan kebutuhan lahan untuk pembangunan ekonomi dan sosial. Diperlukan strategi pengelolaan ruang terbuka hijau yang bertujuan melindungi ekosistem daratan dan perairan beserta keanekaragaman hayatinya, tanpa mengganggu atau membahayakan tujuan penggunaan lahan yang ditetapkan. (Samedi, 1993, pp. 1-6).

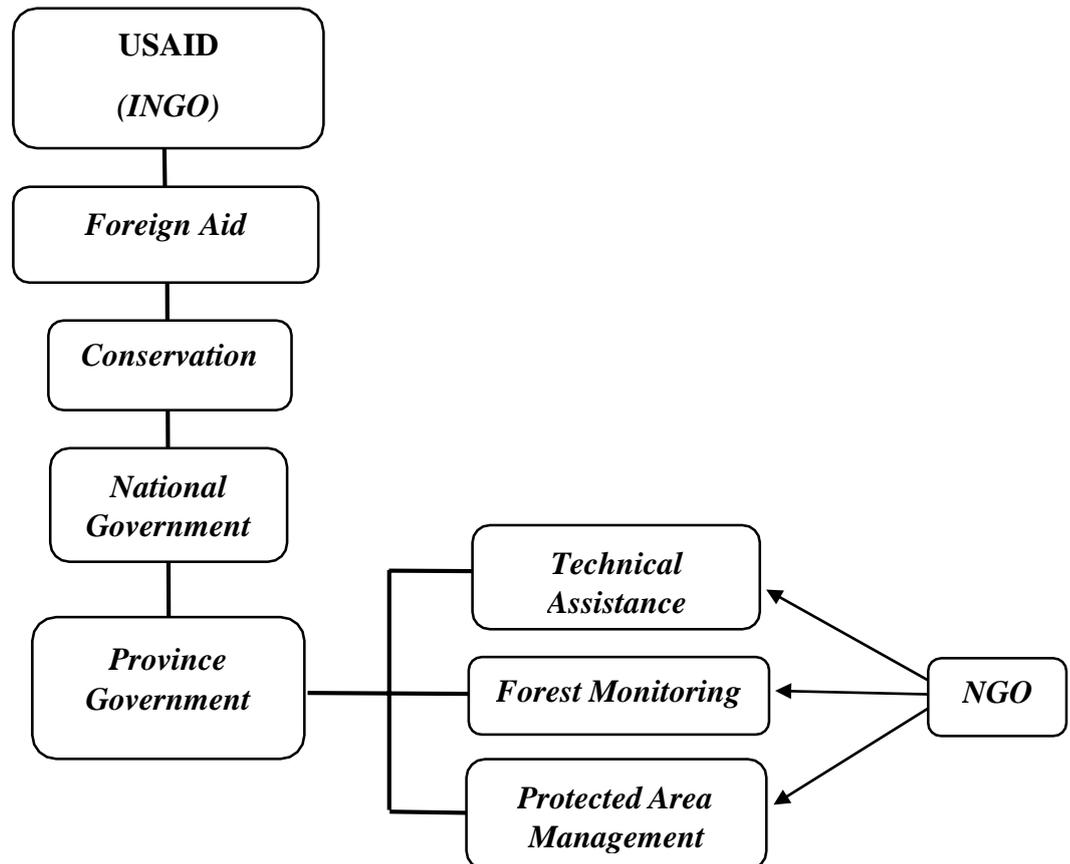
Menurut *International Union for Conservation of Nature (IUCN)*, zona kawasan lindung atau konservasi merupakan salah satu opsi untuk menyelamatkan spesies endemik atau terancam dari kepunahan. IUCN memberikan rekomendasi untuk mengelompokkan kawasan konservasi menjadi enam (6) kelompok berdasarkan tujuan pengelolaannya dalam skala dunia (Nigel, Adrian, & Sue, 1999):

- 1) Kategori Ia: *strict nature reserve*
- 2) Kategori Ib: *wilderness area*
- 3) Kategori II: *national park*
- 4) Kategori III: *natural monument*
- 5) Kategori IV: *habitat/species management area*
- 6) Kategori V: *protected landscape/seascape*
- 7) Kategori VI: *protected area with sustainable use of resources*

Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Langka (CITES), telah melampirkan mengenai perdagangan internasional yang dilarang untuk spesies langka dalam Lampiran I. Undang-undang Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAHE) secara eksklusif mengkategorikan status spesies yang dilindungi ke dalam dua kelompok di tingkat nasional, yaitu spesies dengan populasi yang tinggi (tidak terancam punah) dan spesies yang terancam punah. Spesies yang berada dalam kategori terancam punah adalah spesies yang

dilindungi, yang diatur oleh batasan dan hukuman yang memadai sebagai langkah pencegahan (Indonesia, 1990).

1.5. Sintesa Pemikiran



Sumber: Penulis

Sintesa pemikiran di atas dibuat berdasarkan kerangka berpikir peranan organisasi internasional yang difokuskan pada upaya INGO untuk mengatasi permasalahan lingkungan. USAID sebagai INGO berperan memberikan bantuan dana (*foreign aid*) untuk mendukung upaya konservasi hutan yang dilakukan

melalui Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Melalui bantuan yang diberikan, organisasi internasional berkontribusi dalam melindungi kawasan konservasi dengan melakukan *Technical Assistance*, *Forest Monitoring* dan *Protected Area Management*. Dalam tiga hal tersebut turut melibatkan dukungan serta partisipasi dari berbagai aktor lainnya seperti *International Governmental Organization (IGOs)*, *International Non-Governmental Organization (INGOs)*, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya deforestasi, menekan resiko kerusakan hutan, melakukan pemantauan hutan melalui *forest monitoring* dengan mengidentifikasi wilayah deforestasi dan bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan.

1.6. Argumen Utama

Berdasarkan latar belakang masalah, kerangka berpikir, dan sintesis pemikiran, penulis berargumen bahwa USAID sebagai organisasi internasional telah bekerjasama dengan Pemerintah Pusat dalam pemberian bantuan dana (*foreign aid*) yaitu pada program USAID *Sustainable Environmental Governance Across Regions (SEGAR)*. Program SEGAR ditujukan untuk memperkuat konservasi hutan dengan menekan resiko kerusakan hutan melalui tata kelola lingkungan yang berkelanjutan. Kemitraan yang terjalin dengan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (*Bappenas*). Dengan menggunakan bantuan luar negeri, USAID sebagai lembaga internasional berkomitmen untuk menjaga dan melindungi kawasan konservasi. dengan melakukan *Technical Assistance*, *Forest Monitoring* dan *Protected Area Management* untuk mencegah terjadinya deforestasi dan kerusakan lainnya.

Pengembangan *Corporate Social Responsibility (CSR)* untuk Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat telah dilakukan melalui *technical assistance* dengan tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur tetapi juga pada isu lingkungan. Seperti dukungan terhadap program konservasi dan tata kelola yang berkelanjutan yaitu USAID SEGAR dengan partisipasi sektor swasta seperti perusahaan sawit dan komunitas masyarakat Masoraian. Partisipasi dari LSM tersebut ditunjukkan untuk melindungi hutan seluas 3.006 hektar di Kecamatan Kotawaringin Lama, dengan melakukan pemantauan hutan serta membantu pemerintah dalam mengidentifikasi wilayah deforestasi dan bahaya yang dapat ditimbulkan.

Dalam mengelola kawasan konservasi dengan lebih baik melalui *forest monitoring*, USAID dan pemerintah Indonesia melatih polisi hutan (*ranger*) untuk menjaga kawasan konservasi, mencegah perburuan liar, dan kegiatan terlarang lainnya. Strategi pemantauan kawasan konservasi meliputi patroli darat oleh penjaga hutan atau *ranger*, partisipasi masyarakat lokal, dan LSM. Laporan *ranger* dari 3.660 peristiwa penebangan liar selama dua tahun berjalannya program, telah menunjukkan 90% penurunan perburuan hewan seperti orangutan, harimau, dan gajah. Melalui *protected area management*, USAID SEGAR telah membantu pemerintah daerah mengembangkan forum multipihak yang telah ada dan meningkatkan perencanaan penggunaan lahan dan lingkungan guna melestarikan ekosistem darat. Pengelolaan kawasan lindung dilakukan dengan menggunakan satelit udara untuk mempermudah pemantauan terhadap kawasan hutan Kalimantan

serta memberikan insentif kepada masyarakat, petani, ataupun sektor swasta yang telah menerapkan sistem produksi yang berkelanjutan.

Pendanaan jangka panjang dapat diandalkan untuk pengelolaan dan konservasi hutan. Dalam industri kehutanan, *win-win solution* sering disarankan dengan memungkinkan ekstraksi sumber daya alam yang keuntungannya sekaligus diperuntukan untuk mengakomodasi perlindungan hutan dengan memperkuat kolaborasi pada seluruh pihak. Implementasi yang sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang tengah di upayakan melalui proyek USAID SEGAR adalah dengan menerapkan tata kelola yang lebih berwawasan lingkungan, serta membantu organisasi, sektor swasta, dan masyarakat setempat dalam menerapkan produksi komoditas yang lebih ramah terhadap lingkungan.

Melalui kerja sama langsung dengan lembaga Amerika Serikat, USAID menghubungkan pemerintah dan masyarakat dengan tenaga ahli yang dibutuhkan untuk melindungi kawasan konservasi. Akan tetapi, dalam menjalankan program USAID SEGAR ini dibutuhkan kolaborasi yang matang dengan seluruh pihak, yaitu dengan pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat Pulau Kalimantan. Dimulai pada awal tahun 2021, proyek SEGAR USAID di Kalimantan Barat telah beroperasi di empat kabupaten yaitu Ketapang, Kubu Raya, Sanggau dan Sintang. USAID SEGAR telah berkontribusi dengan melakukan sejumlah studi tentang tata kelola lingkungan untuk mengurangi dampak dari kerusakan lingkungan dan perubahan iklim.

1.7. Metodologi Penelitian

1.7.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam mengkaji suatu objek, kondisi, sistem, ataupun sebuah fenomena yang tengah terjadi. Penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk menyajikan gambaran yang komprehensif tentang suatu situasi atau hubungan fenomena yang ada, atau keadaan sosial budaya (Neuman & Robson, 2014). Pemilihan metode deskriptif dalam penelitian ini didasari oleh tujuan peneliti dalam mendeskripsikan secara detail mengenai upaya-upaya yang dilakukan USAID sebagai organisasi internasional dalam upaya mendukung konservasi dan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan melalui program USAID SEGAR. Selain itu, penulis juga ingin memberikan gambaran mengenai fenomena turunnya jumlah kehilangan hutan primer di Indonesia yang menunjukkan konsistensi Indonesia dalam menjaga wilayah konservasi, sehingga dapat memperoleh penjelasan yang menyeluruh terkait isu atau solusi dari rumusan masalah tersebut.

1.7.2. Jangkauan Penelitian

Untuk pengambilan jangkauan penelitian, penulis memilih periode penelitian pada tahun 2021 dikarenakan pada tahun tersebut, USAID menandatangani kerjasama dengan Pemerintah Indonesia pada 26 Februari 2021. Sebagai lembaga pembangunan internasional yang bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia, program USAID SEGAR berakhir pada 2026. Oleh karena itu, batas akhir waktu penelitian akan diambil pada 2022 yaitu dua tahun setelah berjalannya program USAID SEGAR dan berdasarkan pada data tahunan terbaru yaitu pada tahun 2022. Meskipun program baru berjalan selama dua tahun, proyek ini

dilaksanakan di dua belas Kabupaten yang tersebar di empat Provinsi, lima Kabupaten yang saat ini sedang berjalan dalam monitoring SEGAR menunjukkan dampak yang positif khususnya di Provinsi Kalimantan Barat yaitu Ketapang, Kubu Raya, Sanggau, dan Sintang.

Kegiatan konservasi yang dilakukan dengan memfasilitasi perlindungan area dengan nilai konservasi tinggi termasuk di wilayah non hutan, meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat dalam mengelola dan melindungi sumber daya alam. Contohnya kerja sama dengan kelompok karya Masoraian di Kecamatan Kotawaringin Lama. USAID SEGAR diharapkan dapat mendukung konservasi dan tata kelola hutan Indonesia menjadi lebih baik, dengan mempertimbangkan dampak positif dan kesuksesan dari program pendahulu sebelum USAID SEGAR. Program kerja sama yang dimulai pada 2016 hingga Juni 2021 tersebut ialah USAID BIJAK, yang dikenal sebagai *USAID's Build Indonesia to Take Care of Nature for Sustainability*, merupakan sebuah inisiatif kolaboratif yang bertujuan untuk mengurangi dampak dari emisi Gas Rumah Kaca di Indonesia. melalui perbaikan tata kelola kawasan hutan lindung guna melindungi satwa dan keanekaragaman hayati.

1.7.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode pengumpulan data campuran yaitu primer dan sekunder. Dalam proses pengumpulan data primer, informasi yang diperoleh berasal dari sumber utama atau sumber asli, seperti informasi dari individu dengan melakukan wawancara atau lembar kuesioner (Husein, 2002). Kemudian terdapat karakteristik narasumber yang memberikan informasi atau menjadi informan tentang suatu masalah yang tengah

diteliti. Narasumber harus memiliki wawasan dan keahlian yang cukup dan relevan. Selain itu, sebagai seorang tenaga ahli, narasumber harus mampu memberikan pandangan yang mengandung fakta dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan (Suyanto & Bagong, 2015).

Untuk memperoleh informasi, penulis menggunakan metode wawancara dengan narasumber perwakilan dari USAID Indonesia dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) sebagai informasi dan data tambahan yang tidak ditemukan melalui data sekunder. Sedangkan dalam mengumpulkan data sekunder, penulis menggunakan Melalui kajian literatur, yang mencakup buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya, digunakan sebagai referensi untuk menganalisis isu, solusi, atau pola yang telah terbentuk. (Neuman & Robson, 2014). Data sekunder yang akan penulis gunakan adalah artikel, jurnal, dan melalui web resmi dari masing-masing kabupaten mengenai kerja sama USAID dengan Pemerintah Daerah atau *Local Government*, serta penelitian yang mengkaji tentang pentingnya konservasi dan tatakelola lingkungan yang berkelanjutan, serta kemitraan USAID Indonesia dengan Pemerintah Indonesia dalam bentuk bantuan luar negeri.

Tabel 1.2. Daftar Nama Narasumber

No.	Nama Narasumber	Jabatan
1.	Hadrianus Andjar Rafiastanto	<i>Deputy Chief of Party (DCOP), USAID SEGAR</i>
2.	Muhammad Hermayani Putera	<i>Site Manager for West Kalimantan, USAID SEGAR</i>

1.7.4. Teknik Analisis Data

Dalam menyusun penelitian ini, teknik analisis yang digunakan dalam adalah kualitatif. Penelitian dengan metode kualitatif merupakan penelitian yang jenis temuan dan hasilnya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau dalam bentuk angka, dan semacamnya (Lexy & Moleong, 2007). Hal tersebut menjelaskan upaya USAID sebagai organisasi internasional dalam mendukung Pemerintah Indonesia melalui program USAID SEGAR di Pulau Kalimantan. Fenomena kerja sama USAID sebagai Organisasi Internasional (INGOs) dengan Pemerintah Indonesia beserta sektor swasta, dan Pemerintah Daerah dalam program yang dijalankan melalui program USAID SEGAR pada tahun 2021 hingga 2022. Oleh karena itu, dalam pendekatan analisis data, digunakan metode kualitatif dikarenakan hasil dari penelitian ini tidak dapat diukur dengan angka atau statistik. (Lochmiller, 2015).

1.7.5. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan eksposisi penelitian penulis dan pemahaman tulisan oleh pembaca, penulis akan mengorganisir isi penelitian ini ke dalam empat bagian sebagai berikut::

Bab I berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian secara umum dan khusus, kerangka penelitian, sintesa pemikiran, argumen inti yang digunakan dalam penelitian dan pendekatan metodologi yang digunakan.

Bab II berisi penjelasan tentang upaya USAID dalam program SEGAR melalui Pemerintah Pusat dalam konservasi dan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan. Pembahasan ini diarahkan kepada upaya organisasi internasional

dalam pemberian bantuan luar negeri dengan *Technical Assistance* melalui lembaga pemerintah sebagai aktor domestik.

Bab III merupakan bab yang akan membahas tentang upaya USAID dalam program SEGAR melalui Pemerintah Daerah dan LSM dalam kontribusinya melalui *Technical Assistance, Forest Monitoring, Protected Area Management* guna mendukung tata kelola alam yang berkelanjutan terhadap ekosistem darat.

Bab IV berisis penutup, kesimpulan, dan saran.